

Baubau - Makassar Tetap Terhubung, Buton dan Baubau Bangun Skema Pembiayaan, Bupati Alvin Akawijaya Siapkan Dukungan Anggaran



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memastikan dukungan finansial bersama untuk menjaga keberlanjutan penerbangan Baubau€-Makassar pulang-pergi (PP), sekaligus mendorong agar harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari penguatan konektivitas udara antardaerah di Kepulauan Buton.

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., dengan Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., di Pasarwajo, Senin (31/8/2026). Pertemuan tersebut

membahas skema sharing budget sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah untuk menopang keberlangsungan rute sekaligus menjaga akses penerbangan bagi masyarakat.

Asisten II Setda Kota Baubau Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si., dalam siaran pers, Selasa (1/9/2026), mengatakan dukungan Pemkab Buton diarahkan pada dua kepentingan utama, yakni stabilitas harga tiket dan keberlanjutan rute. “Pemerintah Kabupaten Buton memastikan tetap memberikan dukungan finansial bersama,” kata Dahrul.

Menurut dia, keberadaan penerbangan

Lanjut ke Hal: 7

Korem 143/HO Gelar Sholat Istisqa, Doakan Hujan Segera Turun di Sultra



Laporan: Prasetyo

SULTRA, BP- Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara mendorong Korem 143/Halu Oleo (HO) menggelar Sholat Istisqa bersama prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD jajaran Korem 143/

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Pangkep Bawa 100 Delegasi Hadiri Penutupan Festival Marching Band Baubau, Pertukaran Pendidikan Jadi Agenda Utama

Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Festival Marching Band Kota Baubau Tahun 2026 tidak hanya menjadi panggung kompetisi seni dan kreativitas pelajar. Kehadiran Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Dr. H. Muh. Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., bersama Ketua TP PKK Pangkep Hj. Nurlita Wulan Purnama Yusran, S.I.Kom., M.Si., menjadikan agenda



tersebut sebagai momentum memperkuat hubungan antardaerah melalui pendidikan, seni, budaya, dan pembinaan generasi muda. Rombongan Kabupaten Pangkep yang

tiba di Kota Baubau pada Rabu sore itu berjumlah sekitar 100 orang. Selain kepala daerah dan Ketua TP PKK, delegasi terdiri atas jajaran pejabat pimpinan organisa-

si perangkat daerah, kepala sekolah, guru, serta siswa-siswi yang merupakan perwakilan marching band dari sejumlah sekolah di Ka-

Lanjut ke Hal: 7



Inspektorat Busel Dampingi BPK Provinsi Audit Kinerja Dana BOS Buton Selatan, Pemeriksaan Dilakukan Selama 30 Hari



FOKUS AUDIT

BPK melakukan audit kinerja atas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Buton Selatan.



ENTITAS UTAMA

Dinas Pendidikan menjadi entitas utama yang diaudit kinerjanya.



LIBATKAN LINTAS OPD

Bappeda (perencanaan), Keuangan (penganggaran), dan Inspektorat (pengawasan) turut dilibatkan.



DURASI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.



OUTPUT AUDIT

BPK akan memberikan rekomendasi atas pengelolaan Dana BOS sebagai bahan perbaikan bagi Pemda dan sekolah-sekolah.



PUBLIKASI HASIL

Hasil audit menjadi kewenangan BPK untuk dipublikasikan secara resmi.

“

Tim BPK kali ini lebih kepada persoalan audit kinerja. Lebih kepada bagaimana proses perencanaannya, pelaksanaannya, monitoringnya. Kebetulan yang menjadi objek kali ini adalah seputar dana pendidikan, spesifiknya Dana BOS.

”



SYAMRISAL SARIMAN, SH

Plt Inspektur Daerah Buton Selatan

DUKUNGAN PEMDA



Inspektorat mendampingi BPK dan memastikan sinergi dengan OPD terkait serta komitmen pimpinan daerah (Bupati & Sekda) selama proses pemeriksaan.

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Dana BOS di Kabupaten Buton Selatan menjadi sasaran pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang berlangsung di Inspektorat Daerah Buton Selatan itu dijadwalkan berjalan sekitar 30 hari.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat Buton Selatan, Syamrisal Sariman, SH, mengatakan pemeriksaan kali ini berbeda dengan pemeriksaan laporan keuangan yang rutin dilakukan setiap tahun. BPK secara khusus menilai kinerja pengelolaan Dana BOS, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring.

“Tim BPK kali ini lebih kepada persoalan audit kinerja. Lebih kepada bagaimana proses perencanaannya, pelaksanaannya, monitoringnya. Kebetulan yang menjadi objek kali ini adalah

Lanjut ke Hal: 7

Perjuangan Kepala SDN 1 Masiri Jalaluddin dari Dapodik Berbuah Bantuan Revitalisasi Sekolah Senilai Rp 946 Juta



Kepsek SDN 1 Masiri Buton Selatan Jalaluddin berada di lokasi sekolah

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Enam satuan pendidikan di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai penerima dana revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan. Program tersebut men-yasar sekolah dengan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, terutama pada bagian atap, plafon,

dan rangka kayu.

Kepala SDN 1 Masiri Kabupaten Buton Selatan, Jalaluddin, S.Pd., mengatakan penetapan penerima tidak dilakukan secara otomatis. Sekolah terlebih dahulu harus mengunggah kondisi fisik bangunan melalui aplikasi Dapodik untuk kemudian menjalani proses seleksi berdasarkan tingkat kerusakannya.

Menurut Jalaluddin, sekolah dengan kerusakan sangat par-

ah tidak lagi menjadi objek revitalisasi karena membutuhkan pembangunan gedung baru. Sementara bangunan dengan tingkat kerusakan sekitar 50- 60 persen masih dinilai layak untuk mendapatkan intervensi revitalisasi. “Kalau kerusakan sampai 80-90 persen itu tidak mungkin disetujui revitalisasi, itu sudah harus bangunan baru. Yang wajar itu 50-60

Lanjut ke Hal: 7

APBD Perubahan 2026 Buton Tengah, Bupati Azhari Minta OPD Lebih Cermat Kelola Anggaran



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP - Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, meminta pengelolaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diarahkan secara cermat kepada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pendapatan dan menekan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan.

Arahan itu disampaikan Azhari saat memberikan penjelasan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Buton Tengah di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (31/8/2026).

Menurut Azhari, kebutuhan program mendesak harus menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Karena itu, optimalisasi sumber pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan penghematan belanja agar ruang fiskal dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.

"Pengelolaan APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat, trans-



paran, akuntabel, dan tepat sasaran," kata Azhari dalam rapat tersebut.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Buton Tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Strateginya mencakup penyempurnaan sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, optimalisasi lain-lain PAD yang sah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sementara pada sisi belanja, anggaran diarahkan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta penciptaan lapangan kerja.

"Kita perlu memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar mendukung sasaran pembangunan mak-

ro tahun 2026 dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Azhari.

Penataan keuangan tersebut memiliki arti penting bagi Buton Tengah sebagai daerah otonom yang relatif muda. Kabupaten Buton Tengah resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Juli 2014. Pembentukan daerah itu antara lain ditujukan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemanfaatan potensi daerah.

Dalam konteks nasional, pengelolaan APBD merupakan bagian dari kerangka pengelolaan keuangan negara yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut mengatur antara lain penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Prinsip transparansi anggaran juga menjadi perhatian dalam praktik tata kelola keuangan publik secara global. International Monetary Fund (IMF) sejak 2014 memperkuat Fiscal Transparency Code dengan menekankan kualitas pelaporan fiskal, penganggaran dan proyeksi fiskal, serta analisis dan pengelolaan risiko fiskal.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah, Mazaluddin, didampingi Wakil Ketua II Rusli, unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, Plh Sekda, para asisten, staf ahli, serta kepala OPD. Setelah penyampaian penjelasan umum, pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 akan dilanjutkan melalui rapat-rapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD, termasuk pembahasan mengenai pembiayaan yang mencakup penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada 2026 maupun tahun berikutnya. "Pembahasan selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci bersama DPRD," kata Azhari. (*)

Ridho Rahmadi Mundur dari Ketum Partai Ummat, Fokus Bangun Kampus AI



Ketua Umum sekaligus menantu Amien Rais mundur dari Partai Ummat.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Pergantian kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Ummat setelah Ridho Rahmadi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum per 20 Agustus 2026. Ridho menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari estafet kepemimpinan organisasi, sekaligus memberinya ruang untuk kembali berkonsentrasi mengembangkan kampus artificial intelligence yang baru memasuki tahun kedua.

Posisi ketua umum untuk sementara kini diisi Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat, Ansufri ID Sambo, yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Sementara Muhammad Sadiq ditunjuk sebagai Plt Sekretaris Jenderal dalam agenda penetapan Musyawarah Majelis Syura ke-8 Partai Ummat.

Pengunduran diri Ridho tidak membuatnya sepenuhnya meninggalkan partai. Ia tetap menjadi anggota Majelis Syura, sesuai ketentuan internal Partai Ummat yang menempatkan ketua umum sebagai anggota Majelis Syura yang mendapat penugasan memimpin kepengurusan.

"Saya tidak di kepengurusan, tapi masih sebagai anggota Majelis Syura karena memang aturan di Partai Ummat, ketum adalah anggota Majelis Syura yang ditugaskan," ujar Ridho, dikutip dari detikcom, Kamis (3/9).

Keputusan tersebut, kata Ridho, telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Amien Rais. Menurut dia, Amien mendukung langkah tersebut karena Ridho ingin mencurahkan perhatian lebih besar pada Politeknik Artificial Intelligence BMD yang didirikannya dan kini memasuki tahun kedua.

"Tentu saya berdiskusi dulu dengan Pak Amien, ya beliau mendukung keputusan ini, terlebih karena memang untuk fokus di kampus AI yang baru didirikan dan baru masuk tahun kedua," kata Ridho.

Ridho menggambarkan pergantian kepemimpinan tersebut sebagai mekanisme wajar dalam organisasi yang terus berkembang. Ia mengibaratkan pergantian posisi sebagai perlombaan estafet agar tujuan organisasi tetap berjalan meskipun figur yang sebelumnya berada di garis depan telah menyelesaikan tugasnya.

"Ini tour of duty biasa, organisasi yang modern, kalau pelari di depan mulai 'ngos-ngosan', ya disambut estafet pelari selanjut-

ya, sehingga tim tetap mencapai garis finis," ujarnya.

Dalam pembicaraan dengan Amien Rais, Ridho juga menerima pesan mengenai agenda politik partai ke depan. Amien meminta kepemimpinan baru memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan secara maksimal menghadapi Pemilu 2029.

"Pak Amien mendukung, untuk pesan ke kepemimpinan baru agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Pemilu 2029," ujar Ridho.

Pergantian di tingkat pucuk pimpinan itu juga diikuti pengunduran diri Taufik Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal. Taufik membenarkan dirinya mundur pada tanggal yang sama karena sebelumnya dipilih dalam satu paket kepengurusan bersama Ridho sebagai ketua umum.

"Iya betul per 20 Agustus 2026. Iya (mundur juga) karena terpilih satu paket bersama ketum," kata Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Partai Ummat sendiri baru mendeklarasikan Amien Rais di Yogyakarta pada 29 April 2021, bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Saat deklarasi, Amien diumumkan sebagai Ketua Majelis Syura, sedangkan Ridho Rahmadi dipercaya memimpin kepengurusan partai.

Dalam perjalanan menuju Pemilu 2024, Partai Ummat sempat menghadapi persoalan verifikasi faktual dan pada Desember 2022 awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Setelah menempuh proses sengketa, KPU kemudian menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 24.

Pada Pemilu 2024, Partai Ummat memperoleh 642.550 suara sah atau sekitar 0,42 persen dari suara sah nasional. Perolehan tersebut berada jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen, sehingga Partai Ummat tidak memperoleh kursi DPR RI melalui jalur pemilu tersebut. Catatan ini menjadi salah satu konteks penting bagi pesan Amien Rais agar kepemimpinan baru mempersiapkan partai lebih dini untuk menghadapi Pemilu 2029. (*)

Aisah Dahlan Ungkap Strategi Perempuan Mengelola Stres di Era Modern



Laporan: Lisna

SULTRAPen-guatan kapasitas perempuan tidak cukup berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kemampuan mengelola diri, keluarga, dan organisasi. Pesan itu mengemuka dalam Seminar Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Kamis (3/9/2026).

Seminar tersebut menghadirkan dr. Aisah Dahlan, CM., NLP., CCHT., CI, yang membawakan materi “Harmony Jiwa Perempuan Modern: Strategi Mengelola Stres di Tengah Tekanan Rumah Tangga dan Tantangan Zaman”. Materi diarahkan pada kemampuan mengenali tekanan, mengelola stres, serta menjaga keseimbangan diri dalam menjalankan beragam peran.

Penasihat DWP Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari Andi Sumangeruka, mengatakan penguatan kapasitas perempuan merupakan bagian penting dari pengembangan organisasi. “Perempuan memiliki per-

an strategis dalam keluarga, organisasi, dan masyarakat sehingga pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kapasitas diri perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Arinta, penguatan DWP perlu bertumpu pada tiga agenda utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan sinergi dan kebersamaan. Ketiganya diperlukan agar organisasi mampu merespons perubahan sekaligus memperluas kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Pada tingkat individu, kompetensi, literasi, kepemimpinan, dan kepercayaan diri menjadi modal perempuan untuk menghadapi berbagai perubahan. Adapun pada tingkat organisasi, kapasitas anggota perlu ditopang tata kelola yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan akuntabel.

T a n t a n g a n tersebut memiliki konteks yang lebih luas. Data UN Women menunjukkan perempuan dan anak perempuan secara

global menghabiskan waktu untuk pekerjaan perawatan dan domestik tidak membayar lebih dari 2,5 kali dibandingkan laki-laki. Beban tersebut dapat mengurangi waktu untuk bekerja, belajar, berorganisasi, beristirahat, maupun mengembangkan diri.

Persoalan keseimbangan peran perempuan juga bukan isubar. Secara kelembagaan di Indonesia, organisasi Dharma Wanita mengalami penyesuaian pada era reformasi dan melalui Musyawarah Nasional pada 1999 nama organisasi disempurnakan menjadi Dharma Wanita Persatuan. Perubahan itu memperluas orientasi organisasi pada penguatan kualitas anggota, keluarga, serta kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap beban kerja perawatan semakin menguat, termasuk setelah pandemi Covid-19. UN Women mencatat perempuan tetap memikul porsi terbesar pekerjaan perawatan tidak

berbayar ketika kebutuhan rumah tangga meningkat selama pandemi. Isu tersebut kemudian semakin ditempatkan sebagai bagian dari agenda kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, Arinta menegaskan hasil seminar harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan program organisasi. “Hasil seminar tidak boleh berhenti pada penambahan pengetahuan, tetapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, maupun program kerja organisasi,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, jajaran pengurus DWP Provinsi Sulawesi Tenggara, ketua DWP instansi vertikal, serta ketua dan pengurus DWP Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan itu, DWP Sultra diarahkan menjadi organisasi yang aktif, solid, adaptif, profesional, inklusif, dan berorientasi pada hasil.(*)

Wali Kota Siska Resmikan Barak Dalmas, Perkuat Kesiapsiagaan Polresta Kendari



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari memperkuat dukungan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menghibahkan fasilitas hunian baru bagi personel Dalmas Polresta Kendari. Barak Dalmas Sanika Satyawada tersebut diresmikan Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama Kapolresta Kendari Kombes Pol. Edwin Luis Sengka, Kamis (3/9/2026).

Fasilitas baru itu memiliki kapasitas hingga 50 personel dan dilengkapi kamar serta kamar mandi yang dinilai lebih representatif dibandingkan barak sebelumnya. Keberadaan hunian tersebut diharapkan mendukung kesiapsiagaan anggota yang harus menjalankan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa.

Kapolresta Kendari Kombes Pol. Edwin Luis Sengka mengatakan pembangunan barak menjadi kabar menggembirakan bagi personel karena fasilitas lama sudah tidak layak digunakan. Bangunan sebelumnya, kata dia, telah berdiri sejak periode ketika struktur organisasi kepolisian masih berada di bawah Polda.

“Ini sukacita bagi anggota Polresta Kendari. Barak Dalmas ini menjadi harapan bagi anggota,” ujar Edwin.

Menurut Edwin, kebutuhan tempat tinggal yang layak berkaitan langsung dengan kesiapan personel menghadapi dinamika keamanan di wilayah hukum Polresta Kendari. Ia menyebut kegiatan masyarakat, unjuk rasa, serta patroli yang berlangsung pada pagi, siang, dan malam membutuhkan kondisi fisik anggota yang prima.

“Intinya istirahat yang cukup karena kita sama tahu situasi Kamtibmas di wilayah Polresta Kendari ini sangat tinggi. Kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan unras, dan patroli yang selalu ditingkatkan pagi, siang, dan malam itu diharapkan dapat mendukung,” katanya.

Dari sisi pemerintah daerah, Wali Kota Siska menyatakan hibah tersebut bukan sekadar pembangunan sarana fisik, melainkan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Pemerintah daerah berharap fasilitas yang memadai dapat membantu personel menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Kendari memberikan hibah kepada Polresta Kota Kendari untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, salah satunya gedung untuk tempat tinggal para Dalmas,” kata Siska.

Secara historis, penguatan peran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat tidak terlepas dari perubahan besar setelah Reformasi 1998. Polri dipisahkan dari ABRI melalui proses yang dimulai pada 1999 dan kemudian memperoleh landasan yang lebih kuat melalui TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan itu menegaskan posisi Polri sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks internasional, pengelolaan keamanan massa juga menjadi bagian penting dari tugas kepolisian modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan public order management, termasuk pengendalian massa dan kerusuhan, sebagai salah satu fungsi satuan kepolisian tertentu. PBB bahkan mulai mengerahkan Formed Police Units dalam misi perdamaian sejak 1999, termasuk di Kosovo dan Timor-Leste, dengan tugas menjaga ketertiban umum dalam situasi berisiko tinggi.

Peresmian barak ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolresta Kendari dan pengguntingan pita oleh Wali Kota Kendari bersama Kapolresta. Setelah seremoni, keduanya bersama unsur Forkopimda meninjau langsung bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai fasilitas hunian personel Dalmas.

Nama Sanika Satyawada diambil dari nama batalyon angkatan Kapolresta Edwin Luis Sengka. Nama tersebut memiliki makna perwira yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kehadiran fasilitas baru ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel Polresta Kendari dalam merespons berbagai aktivitas masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan kota.(*)

Bupati Buton Tengah Azhari Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan di HUT Ke-81 Adhyaksa RI



Laporan:Ardi

BUTON, BP- Sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Komitmen itu ditegaskan Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., saat menghadiri peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Buton, Rabu (2/9/2026).

Upacara yang berlangsung di Lapangan Kejaksaan Negeri Buton, Pasarwajo, tersebut dihadiri jajaran kepala daerah se-Buton Raya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bupati Azhari hadir didampingi Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari.

Menurut Azhari, kehadiran pemerintah daerah dalam peringatan tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari agenda seremonial. Momentum itu menjadi

kesempatan untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan Kejaksaan, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat terhadap hukum.

“Kerja sama yang solid antara Pemkab Buton Tengah dan Kejaksaan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, serta berorientasi sepenuhnya pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Azhari.

Peringatan HUT Kejaksaan RI ke-81 tahun ini mengusung tema “Menguatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum Berintegritas Menuju Indonesia yang Adil dan Makmur” Tema tersebut menempatkan integritas dan profesionalitas sebagai elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Secara historis, keberadaan Kejaksaan Republik In-

donesia berakar sejak awal berdirinya negara. Secara yuridis formal, Kejaksaan telah ada sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam rapat PPKI pada 19 Agustus 1945, kedudukan Kejaksaan ditetapkan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Perjalanan kelembagaan itu kemudian berkembang. Pada 30 Juni 1961, pemerintah mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum. Kejaksaan kemudian berkembang melalui berbagai perubahan regulasi dan organisasi mengikuti dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks global, penguatan penegakan hukum juga berkaitan erat dengan perkembangan prinsip rule of law. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan

kan prinsip tersebut sebagai salah satu fondasi tata kelola, yang mencakup kesetaraan di hadapan hukum, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 juga menempatkan perlindungan hak manusia melalui hukum sebagai prinsip penting dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, momentum HUT Kejaksaan RI ke-81 di Pasarwajo menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak berdiri sendiri. Bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, sinergi dengan Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Tim Staf Presiden Verifikasi MBG dan KDMP di Buton Utara, Bupati Afrudin Dampingi Langsung



Laporan: Andina L

BUTON UTARA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara mendampingi Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) melakukan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kamis (27/8/2026). Verifikasi tersebut menyasar pelaksanaan program di Kecamatan Kulisusu sebagai bagian dari rangkaian kunjungan KSP RI selama tiga hari di daerah itu.

Bupati Buton Utara Afrudin Mathara, S.H., M.H., turun langsung mendampingi tim dalam agenda tersebut. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelurahan Lakonea dan SDN 1 Lakonea, Kecamatan Kulisusu, sebelum rombongan bergerak menuju Desa Rombo untuk meninjau program KDMP.

“Verifikasi lapangan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Tim KSP RI di Buton Utara,” demikian pokok kegiatan yang disampaikan dalam agenda pemerintah daerah, dengan peninjauan diarahkan untuk melihat pelaksanaan program secara langsung di lapangan.

Dari Desa Rombo, tim melihat pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat k e l e m b a g a n ekonomi masyarakat desa. Peninjauan langsung diperlukan untuk mencocokkan pelaksanaan pro-

gram dengan kondisi faktual di daerah.

Tim KSP RI yang hadir terdiri atas Mayjen (Purn.) Dr. Benny Octaviar, Dr. Hera Nugrahyu, M.Si., Christopher Nugroho, S.T., M.Si., dan Artinus Hulu, S.E., M.A. Mereka dijadwalkan berada di Buton Utara sejak Rabu (26/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026) dengan agenda berbeda selama kunjungan.

Bupati Afrudin dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Buton Muh. Hardhy Muslim, S.H., M.Si., Dandim 1429 Buton Utara, para staf ahli bupati, asisten Setda Buton Utara, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bagian Setda Buton Utara, serta Camat Kulisusu.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai diterapkan secara bertahap pada 2025. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki pemenuhan gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat sasaran, sekaligus menjadi instrumen intervensi pemerintah terhadap persoalan gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Secara historis, perhatian terhadap program makanan sekolah bukan fenomena baru. Sejumlah negara telah menjalankan skema pemberian makanan kepada anak sekolah selama puluhan tahun. Amerika Serikat, misalnya, memiliki National School Lunch Program yang disahkan pada 1946. Di tingkat global, program makanan sekolah juga berkembang

sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

Sementara itu, penguatan ekonomi berbasis koperasi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Koperasi ditempatkan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional sejak awal masa kemerdekaan dan memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan mutakhir, konsep koperasi desa kembali didorong melalui Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Rangkaian verifikasi di Buton Utara karena itu tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat bagaimana kebijakan nasional diterapkan pada tingkat lokal. “Tim KSP RI melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP di lapangan,” menjadi inti kegiatan kunjungan tersebut.

Dengan pendampingan pemerintah daerah sejak awal hingga pelaksanaan verifikasi, agenda KSP RI di Buton Utara diharapkan memberikan gambaran faktual mengenai implementasi MBG dan KDMP. Hasil kunjungan selama 26-28 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari proses pemantauan program pemerintah pusat di daerah, khususnya terkait pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi masyarakat desa. (*)

Wabup Buton Utara Rahman Dorong Tekan Angka Kesakitan, Pencegahan Harus Jadi Prioritas



Peliput: Ardi

BUTON UTARA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan kesehatan masyarakat dengan memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit. Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2026 di Aula Hotel Saraea, Kecamatan Kulisusu, Kamis (27/8).

Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., mengatakan kompleksitas persoalan kesehatan menuntut keterlibatan lintas sektor. Penyakit menular masih menjadi ancaman, sementara penyakit tidak menular terus meningkat dan turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, pelayanan kesehatan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kuratif atau pengobatan setelah warga jatuh sakit. Pemerintah daerah ingin memperkuat upaya promotif dan preventif agar risiko penyakit dapat ditekan sedini mungkin.

“Rapat ini harus menjadi forum yang produktif untuk mengevaluasi capaian, memvalidasi data dengan akurat, dan menyamakan persepsi antar-lintas sektor demi menekan angka kesakitan di Buton Utara,” kata Rahman.

Penguatan koordinasi tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Regulasi itu mengamanatkan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien karena penyakit menular dapat menyebabkan kesakitan, kematian, dan kecacatan.

Dalam konteks global, pengendalian penyakit menunjukkan bahwa pencegahan dan kerja bersama dapat menghasilkan perubahan besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat cacar menjadi satu-satunya penyakit menular pada manusia yang berhasil dieradikasi secara global. Setelah program vaksinasi dan surveilans intensif,

WHO menyatakan cacar telah diberantas pada 1980.

Pengalaman tersebut juga menunjukkan pentingnya surveilans, penemuan kasus, pelacakan kontak, vaksinasi, dan komunikasi kepada masyarakat. Instrumen serupa kemudian menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan lainnya di dunia.

Di sisi lain, tantangan kesehatan kini tidak hanya berasal dari penyakit menular. WHO menyebut penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronis, secara kolektif menyumbang sekitar 74 persen kematian di dunia. Faktor risikonya antara lain penggunaan tembakau, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, penggunaan alkohol yang berbahaya, dan polusi udara.

“Perubahan cara kerja harus dilakukan. Fokus pelayanan kesehatan tidak lagi hanya pada aspek pengobatan, tetapi harus lebih kuat pada pencegahan, deteksi dini, serta pengendalian faktor risiko penyakit,” ujar Rahman.

Rakornis tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga terkait untuk memperkuat validitas data serta menyusun langkah penanganan yang lebih terukur. Pemerintah berharap kesamaan persepsi dan koordinasi antarsektor dapat mempercepat respons terhadap persoalan kesehatan di tingkat masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Kantor Kemenag Buton Utara, Kepala Bappeda, Ketua TP-PKK, para kepala dinas, Direktur RSUD Buton Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Kabupaten Buton Utara, para camat, Kepala BPJS Kesehatan Buton Utara, para kepala puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Daerah Kesehatan Masyarakat Buton Utara, penanggung jawab program puskesmas, serta narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan IDI Cabang Buton Utara. (*)

Kemenkes Perkuat Deteksi Dini Gangguan Jiwa, Masyarakat Diminta Lebih Peka



JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat deteksi dini gangguan jiwa dengan mendorong masyarakat mengenali perubahan kondisi fisik, emosi, dan perilaku sebelum berkembang menjadi krisis. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan kesehatan jiwa kerap tidak tampak secara kasatmata, sementara penanganan lebih awal dapat membuka peluang seseorang memperoleh pertolongan yang tepat.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan masyarakat dapat mengambil peran dalam memberikan dukungan awal kepada orang yang mengalami persoalan kejiwaan. Menurut dia, bantuan tidak selalu harus dilakukan oleh tenaga ahli, tetapi dapat dimulai dari lingkungan terdekat dengan pendekatan sederhana.

“Tidak perlu menjadi ahli untuk menolong orang yang mengalami gangguan jiwa. Mulai dengan empat langkah sederhana: Tanya, Dengarkan, Temani, dan Hubungkan,” kata Dante dalam Media Briefing Kesehatan Jiwa di RS Soeharto Heerdjan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Empat langkah tersebut dilakukan dengan menanyakan kondisi seseorang ketika terlihat mengalami perubahan, mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi, menemani agar ia tidak merasa menghadapi masalah seorang diri, kemudian menghubungkannya dengan keluarga atau tenaga profesional apabila membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berlangsung konsisten lebih dari dua minggu, seperti gangguan tidur, lemas berulang, perubahan berat badan, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas yang mencolok.

Data program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan urgensi deteksi tersebut. Kemenkes menemukan sekitar 35.000 anak atau 1,08 persen teridentifikasi mengalami gangguan jiwa. Pada kelompok dewasa, sekitar 186.000 orang ditemukan mengalami gangguan depresi dan kecemasan. “Jangan tunggu sampai krisis. Gejala yang muncul sejak awal harus ditangani agar tidak berkembang menjadi krisis,” tegas Dante.

Persoalan ini bukan fenomena baru di Indonesia. Riskesdas 2013 mencatat gangguan mental emosional pada sekitar 6 persen penduduk berusia lebih dari 15 tahun. Lima tahun kemudian, Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Data Kemenkes juga mencatat hasil Sistem Registrasi Sampel 2016 memperkirakan sekitar 1.800 kasus bunuh diri per tahun atau rata-rata lima kasus per hari, dengan 47,7 persen korban berada pada kelompok usia 10-39 tahun.

Di tingkat global, masalah kesehatan jiwa juga menunjukkan beban yang besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan hampir satu dari tujuh orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa pada 2021, atau sekitar 1,1 miliar orang. Gangguan kecemasan dan depresi menjadi dua jenis gangguan yang paling umum. WHO juga mencatat bahwa pandemi Covid-19 turut memperburuk situasi; pada tahun pertama pandemi, prevalensi depresi dan kecemasan meningkat secara signifikan.

Dante mengatakan persoalan tersebut sering luput karena seseorang dapat terlihat sehat secara fisik meski sedang menghadapi masalah mental. “Orang sebenarnya kelihatan sehat, tetapi kalau kita evaluasi, dia punya masalah. Tidak kelihatan secara fisik, tetapi secara mental dia punya masalah. Ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita sehari-hari,” ujarnya.

Untuk memperluas akses deteksi, Kemenkes menyediakan skrining kesehatan jiwa melalui SATUSEHAT menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20). Hasil skrining dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatan jiwa dan menentukan kebutuhan konsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan. Kemenkes juga memperkuat layanan bagi ibu hamil, ibu pascamelahirkan, anak, remaja, hingga dewasa.

Masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologis dapat memanfaatkan layanan Healing119 secara gratis melalui 119 ekstensi 8. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pertolongan agar persoalan kesehatan jiwa dapat ditangani sedini mungkin, sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. (Alwan)

PT FAREN GRAFIKA

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kematian Bambang Jadi Fokus Komnas HAM Usut Kekerasan Demo 27 Agustus



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami rangkaian kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Lembaga tersebut secara khusus menelusuri rangkaian kejadian yang berkaitan dengan meninggalnya Bambang Setiawan.

Pendalaman dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peristiwa sejak sebelum aksi, saat demonstrasi berlangsung, hingga situasi setelah unjuk rasa berakhir. Komnas HAM menilai informasi dari berbagai pihak diperlukan untuk melihat persoalan secara utuh dari perspektif hak asasi manusia.

Komisiner Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan lembaganya telah melakukan pemantauan media dan menghimpun informasi dari sejumlah sumber. Langkah itu dilakukan sejak sebelum pelaksanaan demonstrasi hingga perkembangan terakhir. “Komnas HAM telah melakukan sejumlah langkah, yaitu monitoring media dan menghimpun informasi dari berbagai sumber sejak sebelum pelaksa-

naan unjuk rasa hingga saat ini,” kata Saurlin dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Untuk memperkuat informasi yang diperoleh, Komnas HAM turun langsung ke sejumlah lokasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pemantauan dilakukan di Kompleks DPR/MPR dan Stasiun Palmerah untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan secara langsung.

Komnas HAM juga meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan korban. Rumah sakit, keluarga korban kekerasan, dan pendamping hukum korban menjadi bagian dari pihak yang telah dimintai informasi dalam proses pendalaman.

Dari sisi penanganan aksi, Komnas HAM telah bertemu dengan pihak Kepolisian. Pertemuan tersebut ditujukan untuk memperoleh informasi sekaligus klarifikasi mengenai penanganan massa aksi dan perkembangan terhadap orang-orang yang ditangani aparat setelah demonstrasi.

Kematian Bambang Setiawan menjadi perhatian khusus dalam proses tersebut. Kom-

nas HAM menyampaikan duka cita kepada keluarga Bambang dan menyatakan akan menelusuri seluruh rangkaian kejadian yang berkaitan dengan kematian korban. “Komnas HAM akan melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan meninggalnya saudara Bambang Setiawan,” ujar Saurlin.

Komnas HAM juga telah menerima pengaduan masyarakat terkait rangkaian peristiwa pada 27 Agustus. Pengaduan itu akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Komnas HAM, termasuk dengan terus menghimpun keterangan dari pihak-pihak yang dinilai relevan.

Persoalan tersebut berlangsung dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Indonesia juga mengakui hak berkumpul se-

cara damai dalam kerangka Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Dalam sejarah Reformasi, persoalan demonstrasi dan perlindungan hak warga memiliki catatan panjang. Gelombang gerakan mahasiswa pada 1998 berperan penting dalam mendorong perubahan politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Komnas HAM mencatat Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi, dan sejumlah peristiwa lain sebagai bagian dari catatan pelanggaran HAM yang muncul dalam periode tersebut.

Saurlin menegaskan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam penyampaian pendapat di muka umum maupun dalam penanganan situasi setelah aksi. “Komnas HAM akan terus menghimpun informasi dari berbagai pihak dan sumber yang relevan sebagai bagian dari langkah tindak lanjut atas rangkaian peristiwa tersebut,” katanya. (*)

Polda Banten Dalami Temuan Potasium-40 di Persawahan Cikande



Polda Banten terjunkan tim periksa pembuangan limbah potasium di area persawahan Kampung Bayur, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Laporan: Hadi

SERANG, BP- Polda Banten masih mendalami temuan material yang diduga mengandung bahan radioaktif di area persawahan Kampung Bayur, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Dari pemeriksaan awal, sejumlah sampel menunjukkan adanya Potasium-40 (K-40), tetapi tingkat radiasi di lokasi masih berada dalam kondisi aman.

Pemeriksaan dilakukan Unit Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) Brimob Polda Banten dengan mengerahkan 15 personel. Tim memeriksa tiga area dengan luas sekitar 90 meter persegi, 150 meter persegi, dan 160 meter persegi, termasuk melakukan deteksi radioaktif serta pemeriksaan kimia menggunakan peralatan khusus.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Hutapea mengatakan, pengukuran radiasi latar belakang di lokasi tercatat sebesar 0,05 mikroSv/jam. Sebanyak 12 sampel kemudian diambil untuk memastikan kandungan dan karakteristik material yang ditemukan.

“Dari hasil deteksi awal, radiasi latar belakang di lokasi tercatat sebesar 0,05 mikroSv/jam. Pemeriksaan terhadap sejumlah sampel menunjukkan adanya kandungan Potasium-40 (K-40) pada beberapa sampel, sementara sejumlah sampel lainnya tidak teridentifikasi mengandung bahan radioaktif,” kata Maruli dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).

Pemeriksaan juga mencakup kualitas udara di sekitar lokasi. Parameter gas yang diuji, antara lain IBaT, CH₂, SO₂, O₂, dan H₂S, menunjukkan kondisi normal. Kadar oksigen tercatat 20,9 persen volume.

Menurut Maruli, hasil pemeriksaan awal belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pencemaran radioaktif. Sampel yang menunjukkan kandungan K-40 masih harus melalui identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik material tersebut.

“Beberapa sampel terdeteksi mengandung Potasium-40, namun untuk memastikan kandungan dan karakteristik material

tersebut, sampel masih dilakukan identifikasi,” ujarnya.

Tim KBR Brimob Polda Banten memiliki pengalaman dalam penanganan kontaminasi radioaktif di kawasan Cikande. Pada 2025, unit tersebut dilibatkan dalam penanganan material yang terkontaminasi Cesium-137 (Cs-137). BAPETEN kemudian melakukan pemantauan, pengamanan, dan dekontaminasi di Kawasan Industri Modern Cikande. Pada Oktober 2025, BAPETEN menyatakan sejumlah lokasi yang ditangani telah memiliki tingkat radiasi Cs-137 di bawah tingkat latar belakang dan aman digunakan kembali.

Kasus Cs-137 tersebut bermula dari temuan kontaminasi pada produk udang beku yang diproses perusahaan di kawasan Cikande dan diekspor ke Amerika Serikat. Investigasi pemerintah pada Agustus 2025 juga menemukan material logam yang terindikasi mengandung Cs-137 di tempat pengumpulan besi bekas serta memperluas pemantauan ke wilayah sekitar.

Secara internasional, Potasium-40 berbeda karakter dengan Cs-137 karena K-40 merupakan radionuklida yang secara alami terdapat dalam potasium dan tersebar pada mineral, bahan pangan, serta tubuh manusia. IAEA mencatat potasium alami mengandung sekitar 0,012 persen K-40 dengan waktu paruh sekitar 1,25 miliar tahun. Karena itu, keberadaan K-40 dalam suatu sampel tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pencemaran radioaktif.

Polda Banten kini menunggu hasil identifikasi terhadap 12 sampel tersebut. Hasil penelitian akan menjadi dasar untuk menentukan apakah material yang ditemukan di Desa Nambo Udik berkaitan dengan pencemaran atau merupakan material yang mengandung radionuklida alami. (*)

Inspektorat Busel Dampingi BPK Provinsi Audit Kinerja Dana BOS Buton Selatan, Pemeriksaan Dilakukan Selama 30 Hari

seputar dana pendidikan, spesifiknya Dana BOS,” kata Samrisal.

Pemeriksaan tidak hanya men- yasar Dinas Pendidikan sebagai en- titas utama. Bappeda ikut dilibatkan karena berkaitan dengan aspek peren- canaan, sedangkan perangkat daerah yang menangani keuangan berkaitan dengan penganggaran. Inspektorat berada pada posisi pengawasan seka- ligus mendampingi proses pemerik- saan.

Untuk mendukung kelancaran audit, kegiatan pemeriksaan dipusat- kan di Inspektorat Daerah. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memu- dahkan komunikasi antara tim BPK dan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS.

Syamrisal menjelaskan, pemerin- tah daerah dalam pemeriksaan terse- but berperan memberikan dukungan dan membuka koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Inspektorat, sebagai perangkat daerah yang mem- bantu Bupati dalam fungsi penga- wasan, menjadi penghubung dalam proses pendampingan pemeriksaan.

“Jadi kami sebagai perangkat daerah yang membantu tugas Bupa- ti dalam pengawasan kali ini men- dampingi BPK untuk melakukan audit,” ujarnya, Kamis 03 September 2026 ditemui di kantornya

Berdasarkan surat tugas, pemer-iksaan awal berlangsung kurang lebih 30 hari. Namun, apabila BPK membutuhkan pendalaman lebih lan- jut, proses tersebut dapat diteruskan dengan pemeriksaan lanjutan selama sekitar 30 hari berikutnya. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian pemeriksaan berpotensi berlangsung hingga dua bulan.

Hasil pemeriksaan nantinya di- harapkan menghasilkan rekomendasi mengenai pengelolaan Dana BOS di Buton Selatan. Rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola serta pelak- sanaan Dana BOS di sekolah-seko-

lah.

“Output ini tentunya nanti akan ada rekomendasi dari tim pemeriksa sehubungan dengan pengelolaan Dana BOS di Ka- bupaten Buton Selatan,” kata Syamrisal. Ia menambahkan, re- komendasi itu juga dapat menja- di masukan terkait pelaksanaan pengelolaan dana di tingkat se- kolah.

Program Dana BOS sendiri bukan kebijakan baru. Pemer-intah Indonesia meluncurkan- nya pada 2005 sebagai skema penyaluran bantuan operasional langsung kepada sekolah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kelel- uasaan kepada sekolah dalam mengelola kebutuhan opera- sional. Bank Dunia mencatat, tujuh tahun setelah diluncurkan, program tersebut telah menjang- kau lebih dari 200.000 sekolah dan membantu lebih dari 40 juta siswa.

Dalam perkembangannya, aspek akuntabilitas menjadi ba- gian penting dari pengelolaan Dana BOS. BPK pada 2019 per- nah menyimpulkan bahwa pen- gelolaan pendanaan pendidikan melalui BOS dan Program In- donesia Pintar belum sepenuhnya efektif. Sejumlah persoalan yang ditemukan ketika itu antara lain ketidakakuratan data dalam pengalokasian Dana BOS serta lemahnya proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data pe- serta didik.

BPK juga menegaskan pada 2023 bahwa pengelolaan Dana BOSP harus terus dievaluasi dan diawasi. Pemeriksaan BOSP dapat dilakukan melalui pemer-iksaan keuangan, kepatuhan, maupun kinerja, baik pada ke- menterian maupun pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Menurut Syamrisal, audit ki- nerja BPK tidak memiliki pola wajib setiap tahun sebagaimana

audit laporan keuangan. Pe- meriksaan kinerja ditentukan berdasarkan kebijakan dan program kerja BPK serta fokus persoalan yang dinilai perlu diperiksa. Di Buton Selatan, pemeriksaan kinerja sebel- umnya dilakukan pada 2023 dengan fokus yang, menurut Syamrisal, berkaitan dengan persoalan stunting.

Karena merupakan bagian dari program kerja BPK, pe- merintah daerah tidak mengu- sulkan secara langsung sektor yang akan menjadi objek pe- meriksaan. Fokus audit juga dapat berbeda antara satu kabupaten atau kota dengan daerah lainnya, menyesuaikan tema yang ditetapkan BPK.

“Pada prinsipnya kami tetap men-support apa yang dilakukan oleh tim BPK, bagaimana membangun siner- gi juga dengan OPD atau en- titas terkait, termasuk memas- tikan komitmen pimpinan kita di daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan Pak Sekda,” ujar Syamrisal.

Terkait kemungkinan ha- sil pemeriksaan disampaikan kepada masyarakat, Syam- risal mengatakan kewen- angan publikasi berada pada BPK. Pemerintah daerah akan menunggu proses pemeriksaan dan rekomendasi resmi yang dihasilkan sebelum mengam- bil langkah tindak lanjut.

Dengan demikian, audit ki- nerja Dana BOS di Buton Selat- an tidak semata-mata menjadi pemeriksaan atas penggunaan anggaran, tetapi juga menguji bagaimana kebijakan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan diawasi. Pemer-intah daerah kini menyiapkan koordinasi lintas sektor un- tuk mendukung pemeriksaan hingga seluruh tahapan audit BPK selesai. (*)

Bupati Pangkep Bawa 100 Delegasi Hadiri Penut-upan Festival Marching Band Baubau, Pertukaran Pendidikan Jadi Agenda Utama

bupaten Pangkep.

Kehadiran rombongan terse- but sekaligus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung proses pembinaan marching band di Kota Baubau. Sepanjang rangkaian ke- giatan, delegasi menyaksikan penampilan peserta festival dari berbagai sekolah, termasuk bagaimana seni musik dipadukan dengan gerak, kedisiplinan, kreati- vitas, dan kekompakan kelompok.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan kunjungan tersebut memiliki arti lebih luas daripad- a sekadar menghadiri festival. Menurut dia, pertemuan antar- daerah dapat membuka ruang per- tukaran pengalaman dan praktik baik, khususnya dalam pengem- bangan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler.

“Pemerintah Kota Baubau menyambut baik kehadiran Bupati Pangkep beserta seluruh delegasi. Melalui semangat kerja bersama, seluruh jajaran terkait diharapkan dapat memberikan pelayanan dan fasilitasi terbaik sehingga kunjun- gan tersebut berlangsung dengan lancar,” kata Andi Hamzah.

Agenda delegasi Pangkep juga mencakup studi banding ke SMP

Perjuangan Kepala SDN 1 Masiri Jalaluddin dari Dapodik Berbuah Bantuan Revitalisasi Sekolah Senilai Rp 946 Juta

persen,” ujarnya.

Sekolah yang masuk nomina- si calon penerima sejak tahun se- belumnya kemudian diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan kementerian dalam waktu tiga minggu. Tahapan tersebut dilan- jutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Makassar. Pada 2026, seluruh proses administrasi dilaku- kan secara daring, mulai dari peny- usunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), hingga gambar bangunan.

Jalaluddin mencontohkan, nilai usulan anggaran sekolahnya sem- ula mencapai Rp1,2 miliar. Setelah melalui pembahasan bersama fasili- tator pusat dan disesuaikan dengan standar harga kementerian serta har- ga riil di daerah, nilai yang disetu- jui menjadi Rp946 juta. “RAB awal kami buat Rp1,2 miliar, tapi setelah tawar-menawar dengan fasilitator disesuaikan dengan standar kement- erian dan harga riil di daerah, yang disetujui Rp946 juta,” ungkapnya.

Enam penerima program terse- but berasal dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Sebarannya meliputi dua sekolah di Kecamatan Kadatua, satu sekolah di Kecamatan Lapandewa, serta masing-masing satu sekolah di Kecamatan Batauga dan Sampo- lawa. Penetapan dilakukan kement- erian berdasarkan usulan dinas ter- kait.

Secara nasional, revitalisasi se-

Negeri 1 Baubau dan SMP Negeri 18 Baubau. Kegiatan itu diarahkan untuk bertukar pengalaman mengenai pen- gelolaan pendidikan, pembinaan pe- serta didik, serta pengembangan ke- giatan ekstrakurikuler marching band di lingkungan sekolah.

Secara historis, tradisi marching band berkembang dari budaya musik tiup dan perkusi militer yang telah lama digunakan untuk mendukung kegiatan seremonial, parade, hing- ga membangun semangat kelompok. Di Amerika Serikat, perkembangan musik marching semakin populer pada akhir abad ke-19, salah satunya melalui kiprah komponis dan pemi- mpin band John Philip Sousa. Sousa memimpin U.S. Marine Band pada 1880-1892 dan kemudian memba- wa tradisi band ke panggung publik melalui berbagai pertunjukan dan tur.

Bagi Kota Baubau dan Kabupat- en Pangkep, festival tersebut diharap- kan tidak berhenti pada pencapaian kompetisi. “Festival Marching Band Kota Baubau Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi bagi para peserta, tetapi juga mem- buka ruang yang lebih luas bagi kerja sama antardaerah, khususnya dalam bidang pendidikan, seni, budaya, dan pengembangan potensi generasi muda,” ujar Andi Hamzah. (*)

Baubau - Makassar Tetap Terhubung, Buton dan Baubau Bangun Skema Pembiayaan, Bupati Alvin Akawijaya Siapkan Dukungan Anggaran

Baubau - Makassar memiliki arti strategis bagi mobilitas masyarakat Kabupaten Buton dan wilayah Kepulauan Buton secara lebih luas. Selain memperpendek waktu tempuh antardaerah, konektivitas udara diharapkan membantu kelan- caran arus logistik serta aktivitas ekonomi kawasan.

Dalam konteks sejarah, pener- bangan memang berkembang dari sekadar sarana mobilitas menjadi infrastruktur penting bagi hubun- gan ekonomi dan sosial. Secara global, 54 negara berkumpul di Chicago pada 1 Novemberâ€”7 Desember 1944 untuk menyusun kerangka penerbangan sipil inter- nasional. Konvensi Chicago yang ditandatangani pada 7 Desember 1944 kemudian menjadi fondasi pengembangan penerbangan sipil

yang aman dan tertib serta melah-irkan ICAO pada 1947.

Semangat membangun konektivitas tersebut juga men- jadi alasan Bupati Buton men- dorong agar kerja sama an- tarkepala daerah di Kepulauan Buton tidak berhenti pada sektor transportasi udara. “Para kepa- la daerah di wilayah Kepulauan Buton diharapkan dapat duduk bersama secara berkala untuk merumuskan solusi strategis atas berbagai tantangan pembangu- nan daerah,” ujar Dahrul.

Dorongan kolaborasi men- jadi semakin penting di ten- gah penyesuaian dan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang lebih erat, Dahrul berharap mobili- tas penduduk dan distribusi ba-

rang semakin lancar sehingga konektivitas udara dapat mem- berikan dampak lebih besar ter- hadap pertumbuhan ekonomi kawasan. “Melalui sinergi ini, mobilitas masyarakat dan arus logistik di wilayah Kepulauan Buton akan semakin lancar,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Baubau turut didampingi Asisten III Setda Kota Baubau Sitti Munawar, S.STP., M.Si., dan Kabag Per- ekonomian Setda Kota Bau- bau Safrin, S.Par. Kolaborasi Buton dan Baubau diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga keberlanjutan konektivitas uda- ra sekaligus memperkuat kerja sama pembangunan di Kepu- lauan Buton. (*)

Korem 143/HO Gelar Sholat Istisqa, Doakan Hujan Segera Turun di Sultra

HO. Ibadah tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan sekaligus kesela- matan dan kesehatan bagi mas- yarakat.

Sholat Istisqa dilaksanakan dalam suasana khushyuk. Para prajurit dan PNS TNI AD me- manjatkan doa agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa keberkahan, sekaligus berharap kondisi kekeringan yang berdampak terhadap ketersediaan air dapat segera berakhir.

Kapenrem 143/HO Kapten Inf Rahman Hina, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk permohonan kepada Allah SWT, tetapi juga momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan jajaran Korem 143/HO. “Sholat Istisqa ini merupakan ikhtiar kita bersa- ma untuk memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hu- jan yang membawa keberkahan, serta memberikan keselamatan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” kata Rahman di

Kendari, Senin (31/8/2026).

Menurut Rahman, setelah berbagai upaya dilakukan un- tuk menghadapi kondisi keke- ringan, manusia tetap perlu menyadari keterbatasannya dan menyerahkan hasil akhirn- ya kepada Allah SWT. Karena itu, pelaksanaan Sholat Istisqa diharapkan menjadi pengingat bagi prajurit untuk terus menja- ga keimanan sekaligus mening- katkan kepedulian terhadap lingkungan.

Harapan turunnya hujan juga berkaitan langsung dengan kebutu- han masyarakat terhadap air. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, hujan yang merata di- harapkan dapat mengurangi dampak kekeringan dan menekan risiko ke- bakaran hutan dan lahan yang cend- erung meningkat ketika kondisi kering berlangsung.

Kondisi tersebut memiliki latar belakang klimatologis yang pan- jang. BMKG mencatat Indonesia memiliki sejarah kekeringan dan kelangkaan air yang berkaitan den- gan El Ni  o, antara lain pada 1997, 2015, dan 2019. Fenomena El Ni  o menyebabkan curah hujan di Indonesia cenderung berkurang karena pusat pertumbuhan awan bergeser dari wilayah Indonesia ke

kawasan Pasifik.

Pengalaman 2023 juga memper- lihatkan besarnya dampak periode kering. BMKG mencatat kekeringan meteorologis pada kuartal III 2023 menyebabkan 23.451 hektare sawah terdampak kekeringan dan 6.964 hek- tare mengalami gagal panen. Pada periode tersebut, sejumlah wilayah In- donesia juga mengalami keterlambatan memasuki musim hujan.

Bagi Korem 143/HO, doa dan ikh- tiar tersebut diharapkan berjalan berir-ingan dengan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. “Kita berharap hujan dapat segera turun secara merata di wilayah Sulawesi Tenggara sehing- ga masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air dan dampak kekeringan dapat dikurangi,” ujar Ra- hman. (*)

Baubau Dilanda 10 Kebakaran Lahan hingga Mengancam Permukiman dalam Dua Hari , Damkar Baubau Kerahkan Armada dan Minta Warga Jangan Bakar Sampah

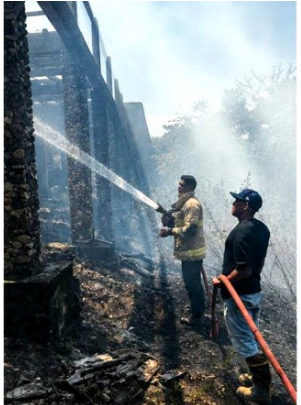


Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Ancaman kebakaran lahan kembali membayangi Kota Baubau. Dalam kurun 31 Agustus hingga 1 September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah titik. Pada periode yang sama, Tim Rescue juga mengevakuasi seekor ular berukuran hampir dua meter dari bangunan RSUD Kota Baubau.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau, H. La Ode Ali Hasan, SE, M.Si., mengatakan sejumlah kebakaran terjadi di lokasi yang berdekatan dengan permukiman, fasilitas pendidikan, kampus, benteng, jaringan listrik, hingga bangunan warga. Kondisi lahan yang kering serta tiupan angin membuat api berpotensi cepat meluas.

Salah satu kejadian yang mendapat perhatian terjadi di Perumahan Asriwijaya 2. Api membakar lahan sekitar dua hektare dan bergerak mendekati kawasan perumahan. Setelah menerima laporan warga, Damkar mengerahkan dua armada dari Mako dan Bungi dengan tujuh



personel untuk mengendalikan api.

Risiko serupa muncul di Perumahan Erlangga Kilometer 5. Api yang berasal dari semak dan lokasi pembuangan sampah menjalar hingga mengenai tiang dan kabel listrik di jalan perumahan. Kobaran bergerak cepat ke arah permukiman sehingga satu armada Mako dengan delapan personel dikerahkan. Area terdampak diperkirakan 15 x 30 meter.

Di Jalan Cendana, Kelurahan Bataraguru/Waliabuku, kobaran api bahkan membuat penghuni rumah panik karena bergerak mendekati bangunan. Angin kencang mempercepat pembesaran api dan memaksa petugas mengerahkan satu armada Mako bersama lima personel. Kebakaran juga terjadi di Jalan Poros Pasar Palabusa dengan area sekitar 30 x 35 meter ketika api mendekati kabel listrik dan dikhawatirkan merambat ke permukiman.

Kebakaran lain tercatat di belakang SMPN 9 Waliabuku, kawasan Keraton Buton, kebun bambu Jalan Lingkar Bungi, kawasan Kampus UMB, belakang Masjid Qubah Baadia, serta titik lain di Jalan Lingkar Bungi. Di belakang



SMPN 9 Waliabuku, api pertama kali diketahui guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Upaya pemadaman menggunakan ember oleh siswa dan guru tidak berhasil sehingga satu armada Bungi dengan lima personel diterjunkan untuk menangani lahan sekitar 10 x 15 meter.

Di kawasan Keraton Buton, kepulan asap tebal dilaporkan warga. Petugas menduga api berasal dari puntung rokok pengunjung benteng dan nyaris mengenai pangung di sekitar lokasi. Luas area terdampak diperkirakan satu hektare. Sementara kebun bambu di Jalan Lingkar Bungi terbakar pada area sekitar 15 x 20 meter dan kobaran telah mendekati rumah warga.

Kasus pembakaran sampah juga menjadi perhatian. Di kawasan Kampus UMB, api diduga bermula dari tumpukan sampah yang dibakar kemudian ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Api merambat ke lahan dan bergerak menuju gedung. Satu armada Mako dengan lima personel dikerahkan untuk menangani area sekitar 15 x 15 meter. Di belakang Masjid Qubah Baadia, kebakaran selalu sekitar 15 x

15 meter juga sempat dicoba dipadamkan warga sebelum Damkar datang. Berdasarkan laporan petugas, kebakaran tersebut diduga dilakukan seseorang dengan gangguan jiwa.

Kebakaran lahan dan pohon kering kembali terjadi di Jalan Lingkar Bungi dengan area sekitar 10 x 7 meter. Warga yang melintas melaporkan kejadian karena di sekitar lokasi terdapat pondok. Secara keseluruhan, seluruh penanganan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material yang signifikan. Keterlibatan warga, relawan Damkar, dan kepolisian turut membantu mempercepat penanganan sekaligus penyampaian informasi kepada petugas.

“Dalam setiap penanganan, keterlibatan warga, relawan Damkar dan kepolisian di lokasi turut mempercepat proses penanganan kejadian sekaligus penyampaian informasi kepada petugas,” kata La Ode Ali Hasan. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan, terutama di kawasan permukiman ketika kondisi lahan kering dan angin bertiup kencang.

Peringatan tersebut sejalan dengan kecenderungan kebakaran lahan yang masih menjadi persoalan nasional saat musim kering. BNPB mencatat pada Juli 2025 terdapat 177 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau 61,67 persen dari total bencana yang terjadi pada bulan tersebut. Pada 2026, BNPB juga melaporkan karhutla dan kekeringan masih mendominasi sejumlah

Maulid Nabi di Masjid Jabal Nur Waliabuku, Camat Bungi Hasrun Ingatkan Ancaman Karhutla



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan kewaspadaan sejak dari lingkungan masyarakat. Pesan itu disampaikan Camat Bungi, Hasrun, S.IP., saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jabal Nur, Lingkungan Pajalele, Kelurahan Waliabuku, Kota Baubau, Selasa malam (1/9/2026).

Hasrun meminta warga tidak mengangap sepele aktivitas yang dapat menjadi sumber api. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas kebakaran yang membuat kewaspadaan terhadap potensi karhutla perlu diperkuat, terutama ketika kondisi lingkungan relatif kering.

“Pastikan api padam sepenuhnya. Jangan meninggalkan sisa pembakaran sebelum dipastikan benar-benar mati,” kata Hasrun dalam arahnya kepada masyarakat.

Ia juga meminta warga memperhatikan

puntung rokok yang dibuang setelah digunakan. Api pada puntung harus dimatikan terlebih dahulu dan puntung dibuang pada tempat yang semestinya. Kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang memiliki bahan mudah terbakar, dinilai berpotensi memicu kebakaran.

“Jangan membuang puntung rokok secara sembarangan. Pastikan apinya benar-benar mati sebelum dibuang,” ujarnya.

Untuk aktivitas perkebunan, Hasrun mendorong masyarakat menggunakan metode pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Pembersihan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar karena api dapat merambat dan sulit dikendalikan ketika kondisi vegetasi kering.

Pencegahan berbasis masyarakat memiliki alasan kuat jika melihat sejarah karhutla di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas karhut-

la nasional mencapai sekitar 2,61 juta hektare pada 2015 dan 1,65 juta hektare pada 2019. KLHK mencatat kondisi El Niño±o, panjangnya hari tanpa hujan, sulitnya sumber air, serta pola pembukaan lahan menjadi sejumlah faktor yang memperparah kebakaran pada periode tersebut.

Dampak karhutla juga pernah melampaui batas wilayah Indonesia. Bank Dunia mencatat kebakaran besar 1997-1998 membakar hampir 10 juta hektare di Indonesia dan menyebabkan sekitar 20 juta orang di Asia Tenggara terpapar polusi udara. Musim kering yang dipengaruhi El Niño±o berkontribusi terhadap penyebaran api, sementara aktivitas manusia menjadi faktor penting penyebab kebakaran.

Karena itu, pesan pencegahan di tingkat kelurahan dan lingkungan menjadi bagian penting dalam memutuskan potensi kebakaran sejak sumbernya. “Kelola dan bersihkan lahan perkebunan tanpa menggunakan cara pembakaran,” kata Hasrun.

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Jabal Nur sendiri berlangsung khidmat dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat. Hikmah Maulid disampaikan Dr. Rusli Iru dan diikuti Lurah Waliabuku Adriasnila, S.Sos., para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu Majelis Taklim yang mengikuti kegiatan hingga selesai. (*)

kencang,” ujar La Ode Ali Hasan. Menurut dia, pencegahan dari tingkat rumah tangga menjadi langkah penting untuk

memutus potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar. (*)



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. POROS PASARWAJO, LASALIM, KEL. WAKOKO, EMAIL: butonkantah@gmail.com_HP. 08532249918

PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG

NOMOR: 6/D1304-21.03/VIII/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nomor Hak	Nama/ Pemegang Hak	Letak Tanah a. Kel/Desa b. Kec	Tanggal Pembukuan	Keterangan
01	Hak Milik Nomor: 00504	LA MARANI	a. Desa/Kelurahan Laburunci b. Kec. Pasarwajo	27/10/2016	Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/B/4/ IV/2026/SPKT/RES BUTON/POL- DA SULTRA Tgl. 06/04/2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 11305/2026
Nama Pemohon : MUSYADIN
DI 301 : 353/2026

Pasarwajo, 27 Agustus 2026

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Buton
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton
tttd

WLLY SONHAJI, S.T.,M.S
NIP. 198410272009121002

kejadian bencana memasuki musim kemarau. Hingga 1 September 2026, misalnya, BNPB masih mencatat kebakaran lahan di sejumlah daerah, termasuk kejadian di Klaten yang diduga dipicu pembakaran lahan dan sampah.

Secara historis, persoalan kebakaran lahan Indonesia juga pernah mencapai skala sangat besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas area terbakar pada 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Di tingkat global, kebakaran juga menjadi persoalan yang semakin serius. UNEP mencatat lebih dari 4,5 juta kebakaran berukuran lebih dari satu kilometer persegi terjadi di dunia sepanjang 2019, sementara kebakaran Australia 2019-2020 membakar lebih dari 18 juta hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa kombinasi vegetasi kering, cuaca panas, angin, dan aktivitas manusia dapat memperbesar risiko kebakaran.

Selain penanganan kebakaran, Tim Rescue Damkar Baubau mengevakuasi ular berukuran hampir dua meter yang ditemukan di dalam bangunan RSUD Kota Baubau. Ular berhasil diamankan dan kemudian dilepasliarkan ke habitat yang sesuai. Damkar meminta warga segera melaporkan setiap titik api maupun kondisi yang berpotensi memicu kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas.

“Warga juga diminta tidak mem-